PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Selasa Tanggal: 25 Juli 2023 Halaman: 1

Sampah-Sampah Menumpuk

TPS Hanya Bisa Bertahan 5 Hari

YOGYA, TRIBUN - Operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Piyungan, sudah dua hari tutup sementara waktu hingga 5 September mendatang. Dampak dari penutupan tersebut pun mulai terasa di wilayah Kota Yogyakarta. Senin (24/7), terlihat tumpukan sampah bermunculan di sejumlah lokasi.

Salah satunya di kawasan Kotabaru, yang belakangan dicanangkan sebagai destinasi wisata premium Kota Yogyakarta. Benar saja, penumpukan sampah tampak di sisi barat Babon ANIEM, yang merupakan bangunan sarat sejarah. Bangunan ini penanda ihwal aliran listrik Kota Yogya dan sudah dibangun sejak era kolonial atau penjajahan Belanda kisaran 1919 silam.

Ironisnya lagi, tumpukan sampah yang terlihat mulai memunculkan aroma menyengat dan rubungan lalat itu, berada tepat di depan rumah salah seorang warga setempat. Otomatis, Suryo Kumoro, pemilik rumah tersebut pun terganggu dengan tumpukan limbah yang dia sendiri tidak mengetahui siapa yang membuang di sana.

● ke halaman 11

KONDISI MENDESAK

- Pemda DIY menyiapkan lahan di Cangkringan sebagai tempat pembuangan sampah sementara.
- Nantinya, lokasi ini akan digunakan menampung sampah dari Sleman dan Kota Yogya selama TPA Piyungan tutup.
- Proses penyiapan saat ini adalah pemasangan geomembran di calon lokasi pembuangan sementara ini.
- Material pelapis itu dipasang agar limbah air lindi dari tumpukan sampah tidak meresap ke tanah dan mencemari.
- Lokasi di Cangkringan ini dipastikan jauh dari permukiman warga.
- Bantul pun sedang menyiapkan tempat pengelolaan sampah terpadu di Banguntapan dan Sanden.

Sampah-Sampah

● Sambungan Hal 1

"Bukan punya saya (sampahnya). Banyak yang naik motor terus membuang sampah di situ. Sepertinya juga bukan warga sekitar, ya," terang Suryo. "Jadi, dilempar begitu saja. Makanya, terus terang ini mengganggu banget. Tumpukan sampah mulai bau, terus dirubung lalat juga itu, kan," uraínya.

Setali tiga uang, seorang pedagang kelontong di sekitaran Babon ANIEM, Suparmi, mengeluhkan hal serupa, karena berpotensi mengganggu aktivitas ekonominya. Akan tetapi, berdasar pengamatannya, bak sampah yang berada di depan warungnya tersebut, dipenuhi limbah-limbah warga dari luar kawasan setempat yang sengaja melemparnya ke sana.

"*Ketoke* (sepertinya_ sampah dari luar itu. Kalau dari warga sini enggak mungkin sampai menumpuk. Jadi, ada yang lewat terus *wer* (membuang) begitu. Semoga segera ada solusinya, biar sampah cepat diambil," cetusnya.

Tumpukan sampah pun terpantau di tepi Jalan Magelang, wilayah Kota Yogyakarta. Mulai dari selatan gapura perbatasan hingga sekitaran seberang kantor KPU Kota Yogyakarta. Tempat sampah di Pasar Kranggan pun terlihat meluber, karena memang seluruh TPS dan depo sampah tidak beroperasi imbas penutupan sementara TPA Piyungan.

Dampak serius

Gerakan *zero* sampah anorganik yang diterapkan di Kota Yogyakarta sedari 1 Januari 2023 berhasil mengurangi sekitar 87 ton limbah per harinya, yang dialokasikan menuju TPA Piyungan. Akan tetapi, penutupan tempat pembuangan akhir hingga 40 hari ke depan diyakini tetap berdampak serius bagi Kota Pelajar.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Ahmad Haryoko mengatakan, penurunan volume limbah sejak gerakan *zero* sampah anorganik dilaksanakan memang terasa. Walau begitu, sisa sampah yang belum terkelola dan harus dibuang ke TPA Piyungan pun masih cenderung tinggi sejauh ini. "Secara berat tonase, masih sekitar 220 ton (yang dibuang ke TPA Piyungan). Baru dari Kota Jogja saja itu, belum Sleman dan Bantul," tandasnya.

Dengan volume harian yang masih mencapai ratusan ton, Haryoko mengatakan, kekuatan depo atau tempat pembuangan sementara di Kota Yogyakarta hanya mampu menampung limbah selama lima hari saja. Setelahnya, jika tempat penampungan sementara tak didapat, otomatis sampah dari warga masyarakat pun berpotensi meluber hingga ke jalan-jalan.

"Kalau kembali ke fungsi regulasi, kami di kabupaten dan kota, selaras undang-undang, bertanggung jawab terkait sampah dari hulu, soal penguranganan sampah. Sedangkan hilirnya, atau di akhir sampah, itu jadi tanggung jawab Pemda DIY," ungkapnya.

Oleh sebab itu, pihaknya pun berharap bantuan dari Pemda DIY agar mencarikan solusi mengenai tempat penampungan sampah sementara yang sifatnya kini sangat mendesak. Bukan tanpa alasan, per Senin (24/7), warga yang disinyalir panik dalam menyikapi kebijakan penutupan TPA mulai membuang sampah di sembarang-tempat. "Meskipun di surat (SE Sekda DIY) menyerahkan ke kabupaten dan kota, ya, tapi memang secara undang-undang itu jadi (tugas) Pemda DIY," urai Haryoko.

Meski demikian, Pemkot Yogyakarta pun telah berulang kali mencari lahan untuk penampungan sampah sementara, jauh-jauh hari sebelum TPA Piyungan ditutup. Namun, dengan wilayah yang cenderung kecil dan sangat padat, ia tidak memungkiri, penyediaan lahan butuh upaya sinergitas dengan kabupaten di sekitarnya. "Kami sudah membuka komunikasi, baik dengan Gunungkidul maupun Kulon Progo, bahkan sejak jauh-jauh hari, sejak 2022 kemarin pemkot sudah menjalin komunikasi, ya," pungkas Haryoko.

Kelola sendiri

Lurah Pasar Lempuyangan, Kota Yogyakarta, Subagyo mengatakan, para pedagang pasar diminta untuk membawa pulang sampah masing-masing. Kebijakan ini berlaku mulai Minggu kemarin hingga sampah-sampah diangkut oleh pihak terkait.

Terkait cukup banyaknya sampah di pintu sisi utara Pasar Lempuyangan, Subagyo mengatakan sampah-sampah itu bukan dari para pedagang pasar. Menurutnya, tidak sedikit oknum pembeli yang membawa sampah dari rumah kemudian dibuang di Pasar Lempuyangan. Bahkan, Subagyo menemui Ketua RT setempat guna menanyakan perihal sampah-sampah yang berada di pintu utara Pasar Lempuyangan tersebut. "Jawaban dari Ketua RT setempat tidak tahumenahu soal sampah-sampah itu," tuturnya.

Anggota Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba, memprediksi dampak penutupan TPA Piyungan selama 45 hari tersebut akan terjadi penumpukan sampah di sejumlah tempat. Pantauan di Pasar Kranggan, tumpukan sampah meluber hingga ke pinggir jalan. Meski tumpukan sampah di sana ditutupi dengan terpal, namun aroma tak sedap tetap tercium.

Sementara di dalam Pasar Lempuyangan, tidak terlihat tumpukan sampah seperti di Pasar Kranggan. Depo sampah yang berada di luar pasar ini pun ditutup. "Menurut informasi seorang petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, penutupan depo sampah Pasar Lempuyangan sejak Minggu kemarin, namun belum pasti hingga kapan penutupan depo sampah ini," jelas Kamba, Senin (24/7).

Semua depo sampah yang Forpi Kota Yogyakarta pantau dalam keadaan tutup. Harapannya dalam waktu yang tidak terlalu lama Pemkot Yogyakarta menemukan lokasi tempat penitipan sampah meskipun sifatnya sementara.

Selain itu Forpi meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menyosialisasikan kebijakan menahan atau membawa sampah untuk sementara waktu. Sinergitas antar-OPD termasuk kahurahan dan kemantren serta elemen masyarakat, sangat perlu dilakukan agar penanganan terkait sampah segera diatasi.

Solusi mendesak

Anggota Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Sigit Wicaksono menyampaikan, revitalisasi TPA Piyungan seharusnya didahului dengan perencanaan sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Pasalnya, ketika tiba-tiba ditutup untuk jangka waktu yang panjang, maka dampaknya bisa dibilang sangat kompleks. Tapi, seandainya sudah benar-benar angkat tangan dan tak sanggup mengatasi polemik sampah, Pemda DIY pun tidak perlu gengsi mengakuinya. Sebab, jika daerah sudah tak mampu, maka berharap bantuan dari pemerintahan pusat pun tidak ada salahnya.

"Tidak usah gengsi. Misal, kalau kelurahan tidak bisa mengatasi persoalan, kan, ada kemantren. Terus jika kemantren tidak mampu, ada pemkot. Kalau pemkot juga tidak mampu, ada DIY. Kalau DIY tidak mampu, bisa ke presiden," ungkap Sigit, Senin (24/7).

Dijelaskannya, sarana dan prasarana pengelolaan sampah merupakan faktor fundamental dalam upaya mengatasi persoalan serius ini. Selain itu, koordinasi lintas daerah, antarkabupaten dan kota di DIY pun sangat diperlukan agar problem segera terurai. "Kalau dibiarkan seperti ini, dampaknya tidak hanya penumpukan limbah, tapi juga merembet ke *problem-problem* lain yang justru lebih besar," katanya.

Sehingga, lanjut Sigit, ego sektoral antarkabupaten dan kota di DIY pun harus dihilangkan, lantaran tidak boleh ada sekat untuk mengatasi masalah sampah. Dia mencontohkan, ketika di Kota Yogya tidak ada lahan untuk penampungan sampah, maka daerah lain yang masih memiliki lahan seharusnya dapat membuka diri dan menyediakan tempat.

"Apalagi, warga dari kabupaten lain itu juga banyak yang sehari-harinya beraktivitas di Kota Yogya. Jadi, tentu turut menyumbang sampah," cetusnya. "Intinya, koordinasi lintas daerah harus berjalan dan jangan gengsi kalau memang benar-benar tidak bisa mengelola sampah, ya," tambah Sigit. **(aka/hda)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 21 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005